



Wilayah: Kabupaten Purworejo

Halaman 13 dan 14

Proyek Bendungan Bener Masih Bermasalah

Pembebasan Lahan Belum Selesai

PURWOREJO - Setelah ramai dikabarkan menyebabkan sejumlah rumah warga, dan fasilitas umum mengalami retak-retak, proyek pembangunan Bendungan Bener masih menyisakan masalah, diantaranya proses pembebasan lahan yang hingga kini belum selesai.

Menurut sumber dari lokasi proyek di Desa Guntur, Kecamatan Bener, pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan tahap pertama yang terdampak proyek pembangunan bendungan mengalami kemunduran waktu dari yang telah dijanjikan.

"Sudah beberapa kali dijanjikan, tapi mundur-mundur terus, dan sampai saat ini belum dibayarkan. Harapannya ya segera dibayar dengan harga

(Bersambung hlm 14 kol 1)

Pembangunan Bendungan Bener Bermasalah

- ◆ Lokasi proyek di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Purworejo
- ◆ Sejumlah rumah warga dan fasilitas umum retak-retak
- ◆ Pembebasan lahan milik warga belum selesai
- ◆ Pembayaran ganti rugi pembebasan lahan tahap 1 mundur
- ◆ Proses pengadaan tanah tahap pertama ada 1.452 bidang tanah yang dibebaskan
- ◆ Tersebar di tiga desa yaitu Desa Guntur dan Desa Laris, Kecamatan Bener, dan Desa Kemiri, Kecamatan Gebang.

Sumber : Diolah di Lapangan

Proyek...

(Sambungan hlm 13)

lahan yang sesuai," kata salah satu warga Desa Guntur yang enggan disebutkan namanya, Jumat (15/11).

Hal itu mendapat pembenaran dari Kepala Desa Guntur, Kecamatan Bener, Nukholip saat dikonfirmasi beberapa wartawan di kantor desa setempat. Ia mengungkapkan bahwa ganti rugi tanah terdampak belum selesai akibat pendataan tanah yang tidak kunjung rampung.

"Informasi yang kami terima proses pendataan belum selesai, masih diperiksa. Memang ada kemunduran dari yang telah dijanjikan," katanya.

Meski belum ada pembayaran ganti rugi, lanjutnya, warga yang lahannya telah digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener telah menyepakati perjanjian sewa lahan dengan PT Waskita selaku pelaksana proyek. Jumlahnya yakni Rp 40 ribu per meter hingga nanti ada pembayaran ganti rugi.

"Karena belum dibayarkan, jadi lahannya disewa. Dan warga sudah sepakat," jelas Nukholip.

Sementara itu, berdasarkan informasi dari Badan Pertanahan Kabupaten Purworejo selaku Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Bendungan Bener wilayah Kabupaten Purworejo diketahui bahwa dalam proses pengadaan tanah tahap pertama ada sebanyak 1.452 bidang tanah yang dibebaskan.

Jumlah tersebut tersebar di tiga desa yaitu Desa Guntur dan Desa Laris di Kecamatan Bener, serta Desa Kemiri, Kecamatan Gebang.

"Tugas BPN selaku P2T sebenarnya sudah selesai untuk tahap pertama ini. Kita sudah selesai melakukan pendataan hingga pengumuman dan sudah menyerahkan hasilnya kepada Appraisal sekitar akhir bulan Desember 2018," kata Suroso, Sekretaris P2T Bendungan Bener saat dikonfirmasi didampingi Anggota P2T, Tukiran di Kantor BPN, Jumat (15/11).

Diaudit BPK

Dijelaskannya, proses pembayaran ganti rugi bukan menjadi wewenang P2T melainkan oleh Kementerian Keuangan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Secara teknis, pembayaran akan dilakukan LMAN melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak selaku Satker pengguna lahan setelah menerima hasil dari Appraisal, dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"BPN tugasnya hanya inventarisasi, mengukur, menyajikan data. Sekarang prosesnya sedang dalam audit BPK. Mudah-mudahan segera selesai," jelasnya.

Menurutnya, ketelitian dan kehati-hatian menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lamanya proses pengadaan tanah. Penghitungan ganti rugi tidak hanya fisik atau lahan melainkan juga nonfisik seperti kerugian secara psikologis atau kehilangan pekerjaan. Dalam hal pendataan dan penghitungan lahan juga terdapat perbedaan standarisasi atau metode antara BPN dengan LMAN.

"Jadi kalau saat ini tim masih bolak-balik ke lokasi itu bukan karena inventarisasi kita belum selesai, tapi memang karena ada data harus diteliti ulang oleh BPK. Hal itu mungkin yang membuat warga menganggap kok pendataannya tidak selesai-selesai," ungkapnya.

Lebih lanjut Suroso menjelaskan pada tahap pertama ini, pengadaan tanah akan digunakan antara lain untuk tapak bendung dan genangan.

Selanjutnya untuk tahap kedua P2T juga sudah bekerja untuk mendata sekitar 2.308 bidang tanah yang berada di tujuh desa. Masing-masing adalah Desa Laris, Limbangan, Guntur, Karang Sari, Bener, Kedung Loteng, dan Desa Kemiri.

Nantinya, lahan yang dibebaskan pada tahap kedua itu akan dimanfaatkan antara lain untuk genangan, perkantoran, akses jalan, jalan, quarry, ruang terbuka hijau, dan disposal.

"Untuk tahap dua kita sudah melakukan pendataan, sudah pengumuman, dan segera akan dilimpahkan ke Appraisal. Tapi sudah diserahkan ke BBWS," jelasnya. (shp-36)